

LAPORAN TAHUNAN

DINAS PENDAPATAN TIMOR LORO'SAE

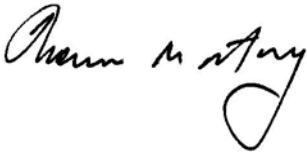
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA

31 DESEMBER 2000



Kepala Badan Pusat Keuangan

Sesuai dengan Pasal 8 dari Peraturan UNTAET 2000/18, bersama ini saya sampaikan Laporan Tahunan yang pertama dari pekerjaan-pekerjaan Dinas Pendapatan Timor Loro'sae untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000.



(Thomas M Story)
KOMISARIS PAJAK SEMENTARA

Dinas Pendapatan Timor Loro'sae

Sekilas Ulasan Komisaris Pajak

Dinas Pendapatan Timor Loro'sae (East Timor Revenue Service, ETRS) didirikan sebagai sebuah badan independen di dalam lingkup Badan Pusat Keuangan (Central Fiscal Authority) sejak tanggal 1 Juli 2000. Berikut ini adalah laporan pertama sejak beroperasinya badan ini. Hal ini merupakan suatu langkah penting dalam memperkenalkan administrasi perpajakan yang transparan dan bertanggungjawab bagi rakyat Timor Loro'sae.

Menurut pasal 8 dari Peraturan 2000/18, saya diwajibkan untuk memberikan laporan kepada Pemerintahan Sementara sekali setiap tahun, dan mengenai hal-hal yang diwajibkan dalam Peraturan tersebut, mengenai operasi dari ETRS. Lampiran-lampiran pada Laporan ini membeberkan keterangan-keterangan yang diwajibkan oleh Peraturan di atas.

Dinas Pendapatan Timor Loro'sae (ETRS) mengelola untuk Pemerintahan Sementara Timor Loro'sae sejumlah pajak, terkecuali pajak-pajak yang dikelola oleh Pengawas Dinas Perbatasan lewat pelimpahan wewenang saya sesuai dengan Pasal 6 dari Peraturan UNTAET 2000/18. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000, maka pajak-pajak yang dikelola oleh ETRS adalah Pajak atas Jasa, Pajak Pendapatan serta pajak-pajak yang dibayarkan di dalam wilayah yang tercakup dalam Zona Kerjasama di Laut Timor. Pungutan yang digariskan dalam laporan ini diperinci dalam Lampiran 1 berdasarkan sumber-sumber pemasukan tersebut.

Selama tahun 2000, Pemerintahan Sementara telah mengesahkan tiga buah Peraturan UNTAET yang berbeda yang mempengaruhi sistim perpajakan. Pertama adalah Peraturan UNTAET 2000/18 tanggal 30 Juni 2000. Peraturan ini memperkenalkan sarana administratif bagi sistim perpajakan di Timor Loro'sae, menciptakan Dinas Pendapatan Timor Loro'sae, dan pula memperkenalkan suatu tindakan baru dalam perpajakan – yaitu pajak atas jasa.

Yang kedua adalah Peraturan UNTAET 2000/32 tanggal 29 September 2000. Peraturan ini menggariskan pajak pendapatan yang berlaku bagi perusahaan-perusahaan untuk tahun pajak 2000, yang akan dipungut selama tahun 2001 jika setelah dinilai perusahaan tersebut patut membayar pajak.

Yang ke tiga adalah Peraturan UNTAET 2000/35 tanggal 20 Desember 2000. Peraturan ini memperkenalkan pajak pendapatan dari gaji/upah untuk tahun 2001, sebagaimana pula pajak yang ditahan/dipotong dimuka bagi beberapa kategori pendapatan.

Pada saat kelahirannya, ETRS memulai kerjanya dengan staf yang sangat kecil yaitu empat orang. Pada tanggal 31 Desember 2000, staf ETRS telah bertambah menjadi 43 orang, 32 orang di antaranya adalah staf nasional warga Timor Loro'sae.

Dari awal yang amat sederhana itu, ETRS telah membangun suatu dasar administrasi perpajakan dengan bantuan dari banyak orang dan organisasi. Khususnya, saya ingin

menyatakan terimakasih saya kepada AusAID dan Banco Nacional Ultramarino yang telah memberikan bantuan yang sangat praktis di fase pengenalan yang penting ini.

Sumber Sumber Daya

ETRS merupakan sebuah departemen dari Badan Pusat Keuangan. Anggaran Belanja Timor Loro'sae dari Kas Negara yang diperuntukkan bagi ETRS untuk satu tahun sampai 30 Juni 2001 menyediakan dana untuk staf nasional sebanyak 54 orang pada tanggal 30 Juni 2001. Angka ini akan tercapai melewati suatu proses penerimaan pegawai secara bertahap selama tahun fiskal tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2000, banyaknya staf nasional adalah sebanyak 32 orang..

Selain itu, ETRS menerima bantuan dari UNTAET untuk mrrmprkrtjakan 6 orang staf internasional dan seorang staf lokal dari UNTAET pada 31 Desember 2000. Program Pemerintah Australia untuk Program Pembangunan Daya Timor Lorosa'e di masa Peralihan (Interim Capacity Building Program for East Timor) telah pula membantu dengan tambahan lima orang staf penasihat ahli perpajakan guna memberi dukungan dalam bidang-bidang penting administrasi perpajakan.

Anggaran Belanja ETRS dapat dilihat pada Lampiran 2. Rincian dari jumlah dan peringkat staf juga diperlihatkan pada Lampiran 2, sebagaimana pula biaya-biaya administrasi dan biaya pengumpulan pajak.

Organisasi

Menurut Pasal 4 dari Peraturan 2000/18, Pemerintahan Sementara harus mengangkat Komisaris Pajak dan dapat mengangkat Wakil-Wakil Komisaris. Selain pengangkatan saya sendiri, Pemerintahan Sementara telah melakukan pengangkatan dibawah ini sesuai dengan Pasal 4:

1. Sdr. Graham Burnett sebagai Wakil Komisaris, yang mulai bekerja sejak 30 Juni 2000.
2. Sdr. Graham Daniel sebagai Wakil Komisaris, yang mulai bekerja sejak 1 Desember 2000.

Dinas Pendapatan Timor Loro'sae terdiri atas 2 Bagian. Bagian Bisnis Besar (Large Business Division, LBD) dikepalai oleh Sdr. Daniel dan bertanggung-jawab dalam masalah-masalah pajak dari para wajib pajak yang penerimaan tahunan brutonya melebihi US\$1 juta. Bagian ini mencakup kewajiban pajak dari para peserta di Area A dari Zona Kerjasama di Laut Timor. Bagian Operasi dikepalai oleh Sdr. Burnett dan bertanggung-jawab atas semua wajib pajak lainnya. Bagan organisasi dari ETRS tertera pada Lampiran 3.

Para wajib pajak perusahaan besar dikelola dari Kantor Pusat ETRS di Dili. Tiga buah Kantor Distrik ETRS sedang dalam rencana, dalam Bagian Operasi. Setiap Kantor Distrik akan menyediakan jasa-jasa pemberian penerangan dan inspeksi. Semua fungsi akuntansi dan penilaian atas para wajib pajak yang tidak besar dilakukan dari Kantor Distrik Dili selama Tahun 2000.

Kantor sementara Kantor Pajak Distrik Dili disediakan selama Tahun 2000, sedangkan tempat yang lebih permanen sedang dibangun sekarang. Dalam Tahun 2001, Kantor Pajak Distrik untuk Baucau akan dibuka. Rencana untuk kantor ke tiga di Maliana ada sudah hampir selesai. Di Distrik-Distrik kecuali Dili, Petugas-Petugas Keuangan Distrik menyediakan bantuan administrasi perpajakan.

Pajak atas Jasa

Dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Peraturan 2000/18, tanggal 30 Juni 2000, ETRS diharuskan mengelola suatu jenis perpajakan baru, Pajak atas Jasa bagi hotel, restoran, penyedia jasa telekomunikasi dan pemilik kendaraan sewa. Pajak ini dikenakan selama Tahun 2000 atas para pemberi jasa, kecuali restoran, yang mencapai jumlah penjualan melebihi \$500 per bulan. Untuk restoran, ambang penjualan yang dapat dikenai pajak adalah \$1000 per bulan.

Dimulainya pajak baru tersebut bertepatan dengan tanggal resmi dibukanya ETRS, yaitu 1 Juli 2000. Pengelolaan Pajak atas Jasa merupakan hal yang berat untuk suatu organisasi yang baru saja berdiri. Tidak adanya pelayanan pos, dan alamat perusahaan yang tidak jelas telah mengakibatkan dalam semua proses pendaftaran para anggota staf perusahaan satu persatu. Kesulitan-kesulitan yang dialami dalam penyebaran informasi diperbesar lagi oleh terlambat disetujuinya Peraturan UNTAET yang mengesyahkannya.

Walaupun ada masalah-masalah demikian, kami telah memperoleh tingkat yang memuaskan di bidang pencatatan dan pentaatan pajak baru tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2000, ada sebanyak 53 buah perusahaan yang telah tercatat untuk Pajak Jasa-Jasa di dalam bidang industri yang ditetapkan untuk dikenai pajak. Tingkat kesadaran pajak di kalangan masyarakat bisnis dianggap cukup.

Penarikan pajak untuk satu tahun sampai tanggal 31 Desember 2000 berjumlah \$1.2 juta. Penarikan Pajak Jasa-Jasa dirinci dalam Lampiran 1.

Pajak Pendapatan

Perangkat-perangkat dalam Peraturan UNTAET 2000/32 tertanggal 29 September 2000 memperkenalkan suatu kerangka bagi pajak pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000. Peraturan ini mengetengahkan suatu versi yang dirubah dari pajak pendapatan yang diterapkan menurut Peraturan 1999/1 yang diadakan menurut peraturan perpajakan Indonesia sebelumnya. Pajak Pendapatan akan ditarik berdasarkan suatu penilaian lewat pengisian formulir pajak pendapatan yang harus dikirimkan paling lambat 30 April 2001. Hanya perusahaan-perusahaan dengan pendapatan layak pajak melebihi \$20.000 yang harus membayar pajak pendapatan untuk Tahun 2000.

Pajak pendapatan secara administratif rumit dan memerlukan dokumentasi yang banyak serta dukungan administratif dari pejabat pendapatan negara. ETRS mempersiapkan diadakannya pajak pendapatan melalui suatu program kunjungan dan survei untuk bisnis di Dili pada bulan Desember 2000. Selain itu, ETRS mempersiapkan panduan untuk pajak pendapatan, bahan-bahan tanya jawab mengenai pajak pendapatan, dan memperisapkan Peraturan Pelaksana UNTAET yang lengkap yang keluar pada tahun 2001. Bahan-bahan ini tersedia di situs web ETRS pada www.gov.east-timor.org/fbea/ atau pada kantor-kantor kami di Dili.

Pajak Pendapatan dari Gaji

Perangkat-perangkat dalam Peraturan UNTAET 2000/35 tertanggal 20 Desember 2000 memperkenalkan adanya pajak upah (pajak pendapatan dari gaji/upah) mulai 1 Januari 2001. Sebagaimana halnya dengan pajak pendapatan dari bisnis, ETRS memulai suatu program pencatatan bagi semua pihak/orang yang mungkin menjadi majikan pada bulan Desember 2000 untuk memberitahu mereka mengenai kewajiban mereka yang baru. Karena terlambatnya peraturan ini dikeluarkan, para pengusaha/majikan sering melaporkan bahwa mereka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi permulaan tanggal berlakunya pajak pendapatan atas gaji yang jatuh tanggal 1 Januari.

Pajak yang dibayar oleh perusahaan yang bekerja di Laut Timor.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000, ETRS telah mengumpulkan \$2.47 juta berupa pajak yang terkumpul dari rekening kontraktor-kontraktor besar yang bekerja di Laut Timor. Hal ini dirinci dalam Lampiran 1. Suatu faktor utama yang mempengaruhi penarikan pajak adalah adanya konsesi yang diterapkan oleh Konvensi Perpajakan Ganda (Double Taxation Conventions) yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia. ETRS memperoleh nasihat ahli hukum bahwa konsesi-konsesi ini tetap mempunyai 'kekuatan domestik' (berlaku di Timor Lorosa'e) menurut Peraturan 1999/1, karena tidak ada pengaturan dari UNTAET yang meniadakannya. Para kontraktor yang bekerja di Laut Timor meminta konsesi-konsesi tersebut dalam menentukan kumpulan pajak yang harus dibayarkan mereka kepada Pemerintahan Peralihan.

Pendaftaran Badan-Badan Amal

Menurut Peraturan 2000/35 tanggal 20 Desember 2000 dan Keputusan Pelaksanaan 2000/7 tertanggal 21 Nopember 2000, saya diwajibkan untuk membuat dan mengelola suatu Daftar Badan-Badan Amal yang memenuhi persyaratan untuk mendapat pembebasan pajak atau memperoleh keringanan berkaitan dengan berbagai pajak mulai 1 Januari 2001. Daftar ini akan merupakan bagian dari hal-hal yang akan dapat dilihat oleh umum di Timor Loro'sae.

Lambatnya pengesahan dari semua perangkat legislatif yang relevan sekali lagi menjadikan kepatuhan memenuhi batas 31 Desember 2000 suatu hal yang mustahil. ETRS memulai bekerja dalam proses pendaftaran pada bulan November 2000 dan membuat perangkat administratif untuk pendaftaran sementara itu mulai 1 Januari 2000 bagi Badan-Badan Amal yang Memenuhi Syarat.

Pembayaran Pajak

Sebagai suatu cara untuk memperbaiki keamanan di sekitar pembayaran pajak, Peraturan UNTAET 2000/18 mengandung larangan keras bagi staf ETRS untuk bertindak sebagai pengumpul pajak. Pembayaran pajak harus disalurkan kepada Kantor Pusat Pembayaran atau agen-agen yang ditunjuknya. ETRS menetapkan fasilitas-fasilitas yang aman untuk penerimaan pembayaran pajak lewat sistim perbankan. Banco Nacional Ultramarino menyediakan pelayanan tersebut.

Di Timor Loro'sae, ada sejumlah kecil wajib pajak yang tinggal di luar negeri yang pajaknya merupakan pendapatan negara yang cukup berarti. Suatu sistim pembayaran secara elektronik didirikan di penghujung tahun 2000 guna memudahkan pembayaran demikian lewat sistim perbankan internasional dan Kantor Pusat Pembayaran.

Pendidikan untuk Para Wajib Pajak

Undang-undang perpajakan sering rumit dan sukar dimengerti. ETRS menyediakan suatu Memoranda Penjelasan bagi ke tiga buah peraturan pajak yang disahkan dalam tahun 2000. Penjelasan-penjelasan ini diperuntukkan bagi para anggota Dewan Nasional dan untuk disebarkan kepada umum. Penjelasan-penjelasan ini dikemukakan dalam bentuk tanya jawab serta mencoba untuk menggambarkan dengan jelas setiap peraturan pajak yang baru itu.

Banyak panduan pajak serta brosur-brosur dibuat oleh ETRS selama tahun tersebut dan tersedia dalam situs web kami.

ETRS melakukan kunjungan perorangan pada perusahaan-perusahaan guna melakukan pendaftaran untuk keperluan perpajakan dan memberitahu mereka tentang sistim perpajakan yang baru ini. Nomor Pengenal Pajak (Tax Identification Numbers atau TIN) adalah tanda pengenal utama yang diberikan kepada wajib pajak menyusul kunjungan demikian. Untuk tahun dalam tinjauan, pendaftaran bisnis berjumlah 295 yang dapat dikenai pajak jasa dan pajak pendapatan pada tanggal 31 Desember 2000.

Pendidikan untuk para wajib pajak perlu digaris-bawahi, bukan saja mengenai struktur dan perincian perpajakan baru itu, tetapi juga merupakan penjelasan yang lengkap tentang mengapa perpajakan diperlukan bagi Timor Loro'sae. Penjelasan demikian itu penting, khususnya bagi penduduk yang berdiam di luar kota Dili. Sejumlah kecil kunjungan untuk memberi penerangan dan nasihat kepada masyarakat setempat

dilakukan selama tahun 2000. Bidang kegiatan ini memerlukan perhatian terus menerus di tahun 2001.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan kepada Sistem Pajak

Terdapat kritik-kritik dari masyarakat bisnis bahwa pajak pendapatan dari bisnis bersifat berlaku surut (retrospektif). Peraturan 2000/32 baru diberlakukan pada tanggal 29 September 2000, tetapi peraturan itu menggabungkan tindakan-tindakan pajak pendapatan menurut Peraturan 1999/1, dengan beberapa perubahan. Saya prihatin bahwa kalangan masyarakat bisnis baru dapat diberitahu selengkapnya tentang pajak pendapatan pada penghujung tahun dan kami telah berikhtiar untuk memberi penerangan kepada kalangan perusahaan lewat forum-forum setempat misalnya Kamar Dagang dan Malam Penerangan dari Lembaga Penanaman Modal (Investment Institute). Keterangan-keterangan juga dapat diperoleh pada situs kami.

Faktor-faktor yang paling signifikan yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pajak pendapatan untuk perusahaan adalah kemampuan ETRS untuk memperoleh akses atas informasi mengenai identitas dan alamat dari berbagai kontraktor yang bekerja untuk mencari laba di Timor Loro'sae dalam perioda pembangunan kembali dan pemulihan yang berlangsung cepat ini. Para kontraktor ini digaji oleh PBB dan lembaga-lembaga multilateral lainnya serta oleh negara-negara pemberi bantuan.

Pada akhir Desember 2000, petugas-petugas ETRS tak diberi akses atas daftar PBB mengenai identitas para kontraktor. Pendapat hukum yang independen yang diberikan kepada saya menyatakan bahwa konvensi-konvensi internasional akan menghalangi ETRS dalam menerapkan hak akses atas informasi demikian. Saya prihatin karena para kontraktor itu hanya akan berada di Timor Loro'sae dalam waktu yang relatif singkat. Suatu tindak lanjut yang cepat atas pajak pendapatan yang masih terhutang tersebut tidak mungkin dilakukan karena tak adanya data yang dapat dipercaya mengenai identitas dan alamat para kontraktor.

Penegakan Kepatuhan Wajib Pajak

Sebuah satuan kecil telah didirikan dalam ETRS untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran (ketidak-patuhan) atas undang-undang perpajakan. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000, kegiatan ini terbatas atas meninjau penyimpanan catatan dan audit singkat atas wajib pajak yang menyediakan jasa-jasa tertentu yang dapat dikenai Pajak Jasa-Jasa. Kasus-kasus yang dipilih untuk diselidiki didasarkan pada tingkat risiko dibandingkan dengan uang yang akan berhasil dikumpulkan.

Tindakan-tindakan ini membuahkan penghasilan tambahan pajak sebesar \$12755 dan denda pajak sebesar \$456 yang dikenakan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000. Perincian lebih lanjut dapat diperiksa pada Lampiran 1.

Kegiatan penegakan kepatuhan pajak ini menunjukkan bahwa banyak kasus di mana standar penyimpanan catatan di kalangan pengusaha jelas tidak memadai. Karena sistim ekonominya hampir seluruhnya berdasarkan pada uang kontan (cash based), maka adanya risiko penyelewengan pajak yang cukup besar dalam hal kewajiban membayar pajak pendapatan jelas sekali. Tidaklah mungkin atau layak bagi ETRS untuk melakukan banyak audit pada waktu ini. Memang diinginkan sekali bila ETRS mengambil pendekatan yang tegas atas penyelewengan pajak, tetapi pada saat yang sama ETRS harus bekerja untuk mendidik masyarakat mengenai sistim perpajakan baru serta mencari jalan guna merangsang para wajib pajak untuk secara sukarela patuh atas kewajiban-kewajiban mereka yang baru itu.

Teknologi Informatika

Bagi suatu negara berkembang seperti Timor Loro'sae, administrasi perpajakan membutuhkan seperangkat peralatan komputer yang terpercaya guna mendukung staf dalam proses-proses inti yang secara minimum berupa registrasi wajib pajak, penilaian dan penghitungan denda, pembukuan serta laporan kepada manajemen. ETRS mulai beroperasi dengan sistim manual yang paling dasar dan peralatan otomatisasi kantor yang sederhana. Walaupun sistim ini cukup untuk wajib pajak yang berjumlah kecil yang dikelola selama tahun 2000, tetapi tak akan memadai bagi suatu sistem pajak pendapatan dan pajak upah di masa depan.

Pada bulan Desember 2000, ETRS menyelesaikan pengujian perangkat lunak komputer yang cocok yang ada di pasaran guna mendukung suatu administrasi perpajakan yang kecil. Canada International Development Agency (CIDA) akan memberikan dana guna pembelian dan penyesuaian (customisation) perangkat lunak tersebut pada tahun 2001.

Membangun Daya Guna di dalam ETRS

Tantangan bagi kami yang sangat signifikan adalah mengembangkan suatu kumpulan staf yang profesional dan penuh pengabdian guna mengelola sistim perpajakan yang baru. Selama tahun 2000, ETRS mencari bantuan dari Australian Agency for International Development (AusAID), Japan International Cooperation Agency, United Nations Development Program dan Canadian International Development Agency (CIDA) untuk memulai proses jangka panjang untuk pembangunan daya guna.

AusAID menyediakan tim terdiri dari lima orang untuk menjalankan sistim perpajakan dan memulai pelatihan serta pengembangan para staf nasional.

Dua orang penasihat perpajakan akan disediakan oleh CIDA mulai pertengahan tahun 2001.

Dengan bantuan dari Akademi Dinas Pegawai Negeri, program-program pelatihan pendahuluan dalam mempergunakan komputer, bahasa Inggris, pembukuan serta konsep-

konsep perpajakan telah dilaksanakan bagi segenap staf nasional mulai September 2000. Sampai pada bulan Desember 2000, pengangkatan staf sampai manajer madya (Tingkat 5) telah diselesaikan dan staf pasangan bagi sejumlah staf internasional telah ditunjuk.

Banyak sekali kemajuan yang akan dapat dicapai oleh ETRS dalam usahanya untuk secara cepat membangun kemampuan dalam perioda Pemerintahan Peralihan ini. ETRS hanya akan berhasil dalam usahanya ini dengan bantuan penuh dari masyarakat donor internasional.

Dili, Juni 2001.

LAMPIRAN 1**TABEL1: PENGUMPULAN PAJAK MENURUT JENIS PAJAK**

Sumber Pajak	Jumlah yang Diterima (SUS) pada 31 December 2000
1. Pajak Jasa	658047
2. Pajak Nilai Lebih (Value Added Tax) Laut Timor	2033286
3. Pajak yang Dipotong (Withholding Taxes)	437074
JUMLAH	3128407

**Tabel 2: ANALISIS DARI PAJAK YANG DAPAT DITARIK, PAJAK YANG TELAH DITARIK DAN PAJAK YANG MASIH BELUM TERKUMPUL:
1 Juli 2000 sampai 31 December 2000**

Jenis		Besarnya \$US
Pajak atas Jasa	1. Jumlah Pajak yang Dapat Ditarik setelah Dinilai:	731228
	2. Jumlah Pajak yang Telah Ditarik setelah Dinilai:	658047
	Pajak yang belum Terkumpul:	73181
Pajak Pendapatan	1. Jumlah Pajak yang Dapat Ditarik setelah Dinilai:	407275
	2. Jumlah Pajak yang Telah Ditarik setelah Dinilai:	407275
	Pajak yang belum Terkumpul:	407275
Laut Timor: Pajak Nilai Lebih	1. Jumlah Pajak yang Dapat Ditarik setelah Dinilai:	2033286
	2. Jumlah Pajak yang Telah Ditarik setelah Dinilai:	2033286
Laut Timor: Pajak Dipotong Dimuka	1. Jumlah Pajak yang Dapat Ditarik setelah Dinilai:	437074
	2. Jumlah Pajak yang Telah Ditarik setelah Dinilai:	437074
Jumlah	Pajak yang Dapat Ditarik setelah Dinilai:	3608863
	Pajak yang Telah Ditarik setelah Dinilai:	3128407
	Pajak yang Belum Terkumpul:	480456

TABEL 3: RINGKASAN DARI KASUS-KASUS YANG DIAUDIT (PAJAK JASA)

Jenis	Besarnya \$(US)
Jumlah Pajak Menurut Penilaian – Pajak Utama	12755
Jumlah Pajak Menurut Penilaian (Pajak Tambahan: Pasal 72)	400
Jumlah Pajak Menurut Penilaian (Pajak Tambahan: Pasal 73)	56
Jumlah Pajak Utama dan Pajak Tambahan	13211

LAMPIRAN 2**TABEL 4: DAFTAR TINGKAT STAF YANG TELAH DISETUJUI OLEH ETRS DAN YANG TELAH DIANGKAT SAMPAI PADA 31 DECEMBER 2000**

Tingkat Staf	Yang Disetujui	Yang Telah Diangkat
7	1	
6	1	
5	8	6
4	19	16
3	14	8
2	8	2
1	2	
Total	53	32

TABEL 5: BIAYA OPERASI ETRS¹

Jenis	Besarnya \$(US)
Barang dan Jasa	94740
Gaji dan Upah	12482
Dana Pokok (Capital)	52474
Jumlah	159696

TABEL 6: BIAYA ETRS DALAM MENARIK PAJAK²

Jenis	Besarnya \$(US)	Biaya Menarik Pajak (%)
Pajak Jasa-Jasa	658047	14.7
Pajak Nilai Lebih Laut Timor	2033286	1.3
Pajak yang Dipotong Laut Timor	437074	1.3
Jumlah yang Ditarik	3128407	5.1

¹ Biaya bagi Anggaran Belanja Timor Lorosa'e (East Timor Consolidated Budget, ETCB)

² Biaya ETCB sebagai bagian dari keseluruhan pajak yang dikumpulkan

LAMPIRAN 3

